



Disbudpar Telanjur Cairkan 59 Proposal **Khawatir Bansos Rp 2,12 M Jadi Temuan BPK**

'Soal bansos terlanjur cair, belum kita sikapi. Rencananya melakukan konsultasi ke BPK dan BPKP, apakah pencairan itu menyalahi prosedur atau tidak, nantilah,' (Inspektorat Karangasem)



● NUSABALI/NANTRA

AMLAPURA, NusaBali

Terlanjur cairnya bantuan sosial (bansos) senilai Rp 2,123 miliar berasal dari 59 proposal bersumber dari APBD 2015 di Dinas Budaya dan Pariwisata Karangasem, membawa kekhawatiran bakal menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebab, pencairan itu bertentangan dengan UU No 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah. Sedangkan bansos yang belum cair hanya 16 proposal senilai Rp 217,5 juta.

Kepala Disbudpar Karangasem I Wayan Purna mengakui, bansos terlanjur cair yang bersumber dari anggaran induk APBD 2015, sedangkan yang belum cair anggaran dari APBD Perubahan 2015. Purna mengatakan hal itu di Amlapura, Minggu (6/9).

Purna hanya membatalkan pencairan sisa usulan masyarakat sebanyak 16 proposal, Rp 217,5 juta, setelah resmi diberlakukan UU No 23 tahun 2014, terutama yang diatur dalam pasal 298 (4) dan ayat (5). Lebih spesifik lagi bunyi ayat (5) Belanja hibah sebagai mana pada ayat (4) dapat diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha

AKTIVITAS di salah satu desa pakraman, yang kini tak lagi menerima hibah Bansos menyusul berlakunya UU No 23 tahun 2014.

Milik Daerah, atau badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

"Hanya hibah bansos bersumber dari APBD Perubahan 2015, yang tidak bisa cair, menyusul berlakunya UU No 23 tahun 2014," katanya.

Secara terpisah Inspektur pada Inspektorat Daerah I Wayan Sudarsana belum menyikapi, terkait bansos terlanjur cair, apakah nantinya jadi temuan BPK, saat melakukan audit penggunaan anggaran tahun 2016. "Soal bansos terlanjur cair, belum saya sikapi. Rencananya melakukan konsultasi ke BPK dan BPKP, apakah pencairan itu menyalahi prosedur atau tidak, nantilah," kata Sudarsana.

Sebab, bansos yang terlanjur cair nominalnya miliaran rupiah. Bukan saja, di Budpar Karangasem, paling banyak di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Karangasem. Hanya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karangasem yang belum mencairkan bantuan itu, sebesar Rp 230 juta.

Bansos yang terlanjur cair menu-

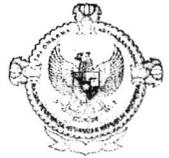
rut Kepala Bagian Kesra Ida Bagus Gede Pidada, atas dana APBD 2015 di anggaran induk, sesuai usulan 269 proposal senilai Rp 4,17 miliar berasal dari organisasi 2 proposal senilai Rp 120 juta, dan 267 proposal berasal dari organisasi keagamaan senilai Rp 4,05 miliar.

Sedangkan hibah bansos yang terganjal pencairannya dari Bagian Kesra Rp 11,526 miliar, berasal dari usulan 698 proposal tersebut, di antaranya berasal dari: proposal kegiatan 68 proposal, proposal pengganti 52 proposal, prioritas 14 proposal, rekomendasi Bupati Karangasem 40 proposal, rekomendasi Wakil Bupati Karangasem 157 proposal, rekomendasi anggota dewan 263 dan yang lain-lainnya.

Mulanya RAB (rencana anggaran biaya) untuk 698 proposal Rp 30,39 miliar, setelah direkomendasi SKPD (satuan kerja perangkat daerah) menjadi Rp 11,526 miliar. Dana Rp 11,526 miliar tersebut nantinya dialihkan untuk membiayai kegiatan. **k16**

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 8



Dua Kasus Dugaan Korupsi di Pemkot Denpasar Perdin Audit Kerugian Negara, PD Parkir Audit Investigasi

DENPASAR, NusaBali

Dua kasus dugaan korupsi di Pemkot Denpasar yaitu terkait perjalanan dinas (Perdin) DPRD Kota Denpasar dan PD Parkir Kota Denpasar sudah masuk tahap audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali. Namun khusus untuk kasus PD Parkir, Kejari Denpasar meminta BPKP melakukan audit investigasi.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir yang dihubungi Minggu (6/9) mengatakan, kasus dugaan korupsi Perdin DPRD Kota Denpasar dan PD Parkir Kota Denpasar masih terus berjalan. Kedua kasus tersebut masuk tahap audit oleh BPKP Wilayah Bali. "Dua kasus ini masih berjalan dan sekarang menunggu hasil audit BPKP," jelas Syahrir.

Ia mengatakan ada perbedaan au-

dit yang dilakukan BPKP untuk dua kasus tersebut. Untuk kasus Perdin BPKP melakukan audit hanya untuk menghitung kerugian negara. Namun khusus untuk PD Parkir, BPKP diminta melakukan audit investigasi. "Khusus untuk PD Parkir kami minta BPKP melakukan audit investigasi. Jadi nanti BPKP juga akan melakukan investigasi langsung terkait kasus ini," jelasnya.

Syahrir memastikan, dalam waktu dekat hasil audit BPKP untuk kasus Perdin akan segera rampung. Namun, meski belum ada hasil audit BPKP, penyidik sudah bisa meningkatkan status kasus ini menjadi penyidikan. "Kami pastikan dalam waktu dekat ini status untuk kasus Perdin akan dinaikkan menjadi penyidikan. Kita tunggu saja," ujar Syahrir.

Dalam kasus Perdin, penyidik awal-

nya meneliti berkas-berkas soal perjalanan dinas yang dilakukan SKPD Pemkot Denpasar dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Denpasar pada 2013 lalu. Pemeriksaan ini berdasarkan temuan BPKP terkait perjalanan dinas tidak wajar yang mencapai Rp 500 juta. Nah, dari temuan BPKP Rp 500 juta terkait perjalanan dinas yang tidak wajar ini memang sudah dikembalikan semuanya. Yang paling banyak mengembalikan yaitu Sekwan DPRD Kota Denpasar yang mencapai Rp 250 juta. Sisanya dikembalikan SKPD lainnya di Pemkot Denpasar.

Sementara dalam kasus dugaan korupsi PD Parkir Kota Denpasar, penyidik membidik beberapa penyimpangan yang diduga terjadi di PD Parkir Kota Denpasar, diantaranya terkait penyertaan modal dan pengelolaan parkir. rez

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 3



Kasus Mark Up Lahan Undiksha Kejati Bidik Tersangka Lain

DENPASAR, NusaBali

Setelah melakukan penahanan terhadap lima tersangka dugaan mark up lahan untuk Kampus FOK Universitas Ganeshana (Undiksha) Singaraja, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali kembali membidik tersangka lainnya dalam kasus ini. Kuasa hukum dua tersangka pemilik tanah malah meminta kejaksaan memproses pemilik tanah lainnya tanpa tebang pilih.

Lima tersangka yang sudah ditahan yaitu I Wayan Suarsa (Pejabat Pembuat Komitmen), I Nyoman Mustiara (pemilik tanah) Nengah Nawa (Kepala Desa Jinengdalem), Sri Putu Sugirinata (Kabag Perencanaan Undiksha) dan I Dewa Komang Indra (pemilik tanah). Ketut Ngastawa yang merupakan kuasa hukum dua tersangka pemilik tanah yaitu Mustiara dan Komang Indra meminta penyidik kejaksaan juga memproses pemilik tanah lainnya yang digunakan untuk lahan Undik-

sha di Jinegdalem.

Pasalnya, banyak pemilik tanah yang menjual tanahnya lebih mahal dari dua kliennya tapi sampai sekarang tidak dijadikan tersangka. "Klien kami jual tanah Rp 18 juta per are dan dijadikan tersangka. Tapi pemilik tanah lainnya ada yang jual Rp 20 juta per are tapi tidak dijadikan tersangka," tegasnya, kemarin.

Sementara itu, Aspidsus Kejati Bali, Erna Normawati mengatakan setelah menetapkan lima tersangka dan melakukan penahanan, pihaknya masih terus mengembangkan kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 3 miliar. Bahkan Erna mengungkapkan sudah ada calon tersangka lainnya dari luar Undiksha. Namun ia enggan membeber siapa calon tersangka tersebut. "Masih ada yang berpeluang jadi tersangka dan mereka di luar Undiksha," ujarnya saat melakukan penahanan terhadap

tiga tersangka Undiksha pada Kamis (3/9) lalu.

Seperti diketahui, dalam aksinya kelima tersangka melakukan mark up harga tanah dari harga Rp 6,5 juta per are menjadi Rp 18 juta per are. Parahnya lagi, tanah yang digunakan untuk kampus Undiksha ini baru dikuasakan menjual oleh kelima tersangka. Lalu tanah ini akhirnya dilunasi setelah alokasi dana Rp 7 miliar untuk pengadaan lahan ini cair. Dari perhitungan inilah ada kerugian negara mencapai Rp 3 miliar.

Dalam kasus ini, penyidik Kejati Bali, Akmal Kodrat, Gede Arthana, Wayan Suardi dan Subekan sudah memeriksa puluhan saksi termasuk pejabat Undiksha. Diantaranya Rektor Undiksha, Dr I Nyoman Jampel, mantan Rektor, Prof I Nyoman Sudiana dan Prof I Ketut Seken. Selain itu, dua guru besar Undiksha, Prof Raid dan Prof Suma juga telah diperiksa sebagai saksi. rez

Edisi : Senin, 7 September 2015

Hal : 3



Solusi Penghentian Proyek Long Storage

Muara Tukad Mati

Pemprov Upayakan Penerbitan Diskresi

Penerbitan diskresi sedang dikaji, apakah oleh gubernur atau Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

DENPASAR, NusaBali

Pemprov Bali berencana mengeluarkan diskresi untuk jalan keluar (solusi) menyusul penghentian proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta.

Hal itu diungkapkan Kadis Kehutanan Provinsi Bali I Gede Nyoman Wiranata, di Denpasar, Minggu (6/9). Wiranata mengatakan telah meminta saran Gub-

ernur Made Mangku Pastika. Sesuai arahan Gubernur Pastika, demi kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan serta tetap menegakkan aturan proses sesuai prosedur maka diupayakan ada sebuah langkah.

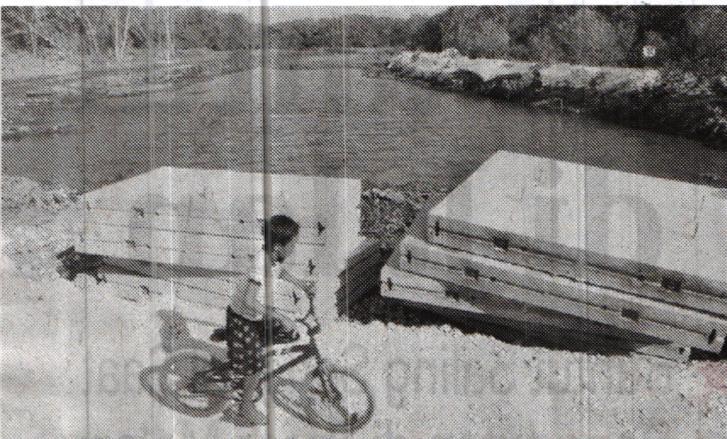
"Saran Pak Gubernur diupayakan ada penerbitan diskresi agar kegiatan berjalan sebelum revisi perubahan blok tahura diselesaikan," ujar Wiranata.

Menurut Wiranata, diskresi tersebut sedang dikaji. Apakah akan dikeluarkan gubernur ataukah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena pemprov hanya berwenang mengelola tahura. Sedangkan pengesahan rencana, pengelolaan-pemanfaatan tahura masih di pusat. "Siapa yang akan menerbitkan diskresi ini masih dikaji," ujar Wiranata.

Pengertian diskresi, yakni keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh

pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Menurut Wiranata untuk sementara diskresi merupakan solusi atas proyek penataan muara Tukad Mati berjalan, sebelum revisi blok tahura selesai. "Diskresi itu kebebasan bertindak yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam menjalankan kewenangan dan perbuatan hukum yang berpedoman dengan asas umum yang baik. Artinya dalam masalah ini ada keputusan yang mengatakan dapat dilakukan kegiatan di tahura sebelum revisi blok tahura yang disepakati selesai," tutur birokrat



• NUSABALI/YUDA

SEORANG bocah laki-laki melintas di dekat material proyek pembangunan long storage muara Tukad Mati di wilayah Pata Sari, Lingkungan Jaba Jero, Kuta, Jumat (4/9). Proyek dihentikan sementara sambil menunggu kesepakatan soal zona tahura.

asal Desa Tangguntiti, Kecamatan Kerambitan, Tabanan, ini seraya menyebutkan penerbitan akan

secepatnya diupayakan supaya segera selesai masalah di muara Tukad Mati. **nat**

Edisi : Senin, 7 September 2015
Hal : 2